

PEMKAB KAPUAS SUSUN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) setempat, melakukan Presentasi Akhir Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Bappelitbangda, Selasa.

“Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Pemkab Kapuas dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya,” kata Kepala Diskominfoantik Kapuas, Hartoni U Sawang, usai kegiatan.

Dengan jumlah peserta, sambungnya, kurang lebih sebanyak 130 orang, berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit daerah, dua kecamatan dan tiga puskesmas yang berada dalam lingkup Kota Kuala Kapuas.

Kegiatan akhir ini merupakan tahapan kegiatan terakhir dari proses penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang diawali dengan persamaan persepsi, dilanjutkan dengan kegiatan Survei Online dan Survei Offline pada Juni 2024.

“Kemudian juga dilakukan FGD (Focus Group Discussion) Peta Rencana September 2024, dan presentasi Akhir yang kita laksanakan pada hari ini. Kita bersama tentunya ingin suatu kondisi di mana Arsitektur dan Peta Rencana menjadi acuan untuk implementasi yang menyelaraskan dan mengakomodir penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kapuas Ahmad M Saribi yang hadir mewakili Penjabat Bupati Kapuas dalam sambutannya mengatakan SPBE adalah Sistem Administrasi Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk itu menurutnya, maka penting untuk melakukan integrasi teknologi elektronik dalam berbagai aspek tata Kelola Pemerintahan, dalam bentuk Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Pemda.

“Arsitektur dan Peta Rencana SPBE menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan SPBE, seperti penyiapan aplikasi, infrastruktur TIK, serta pembentukan layanan digital pada Pemerintah Daerah. Dengan ini layanan digital yang terpadu akan terwujud. Kemudian akan meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang lebih sistematis, sederhana dan terpadu,” kata Saribi.

Implementasi SPBE memerlukan koordinasi antar berbagai Lembaga Pemerintah, pengembang teknologi informasi, serta pihak terkait lainnya. Selain itu perlu adanya upaya maksimal dalam mengamankan data dan privasi pengguna juga menjadi perhatian utama dalam menjalankan sistem ini.

“Dengan dukungan yang baik dan komitmen penuh dari semua pihak terkait, SPBE diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam modernisasi Pemerintahan Indonesia, mendukung transformasi digital dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” demikian Saribi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kapuas, Tenaga Ahli dari ITS Surabaya Toni D. Susanto selaku narasumber, Tim Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Alvici Aura serta seluruh peserta.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/730869/pemkab-kapuas-susun-arsitektur-dan-peta-rencana-spbe>, Rabu, 20 November 2024.
2. <https://kip.kapuaskab.go.id/berita/read/8328/diskominfosantik-kapuas-gelar-presentasi-akhir-penyusunan-arsitektur-dan-peta-rencana-spbe>, Selasa, 19 November 2024.

Catatan:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Nasional 2005-2025, *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, dan RPJM Nasional 2014-2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu

dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.